

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk oleh individu maupun badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama dengan berpedoman pada nilai kekeluargaan dan prinsip koperasi. Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan. Keberadaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemenuhan berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan, koperasi juga berfungsi memperluas kesempatan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam memperoleh layanan ekonomi yang sering kali sulit diakses melalui lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat (UMKM) (Hutapea et al., 2024).

Permasalahan koperasi masih menjadi tantangan di Indonesia. Selama periode 2014–2019, Kementerian Koperasi dan UKM membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang dinilai bermasalah (Detik Finance, 2025). Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Bali, di mana sejumlah koperasi menghadapi kendala dalam aspek kinerja keuangan. Menurut Sumartini (2021), kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang dinilai melalui pencapaian finansial dengan membandingkan realisasi terhadap target atau anggaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Arifuddin et al. (2023) mengemukakan bahwasanya kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan sebuah organisasi selama periode tertentu, sekaligus menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memperoleh hasil yang optimal. Tingkat kinerja keuangan setiap perusahaan dapat berbeda karena dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang diterapkan pada masing-masing organisasi (Jumiari & Julianto, 2020).

Kinerja keuangan koperasi memiliki posisi yang sangat vital karena mencerminkan kesehatan, stabilitas, dan kemampuan koperasi guna mewujudkan tujuan utamanya, yakni mengoptimalkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kinerja keuangan yang baik sangat penting dalam mendukung koperasi menjalankan operasional sehari-hari, memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dan anggota (seperti pembayaran simpanan atau Sisa Hasil Usaha/SHU), serta memiliki dana untuk investasi dan pengembangan usaha di masa depan. Kinerja keuangan koperasi bermasalah dapat mengikis kepercayaan anggota dan masyarakat, mengancam kelangsungan hidup koperasi hingga berpotensi bangkrut (likuidasi) karena ketidakmampuan melunasi utang, dan secara langsung menggagalkan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota yang menjadi mandat utama koperasi.

Kinerja keuangan diukur menggunakan indikator aset, omset, laba bersih, modal (Sinarwati & Prayudi, 2021; Arifuddin et al., 2023), di mana laba menjadi aspek fundamental yang merefleksikan keberhasilan finansial dan efisiensi operasional. Namun, bagi koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggota, pengukuran kinerja keuangannya tidak menggunakan istilah laba bersih, melainkan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ialah akumulasi pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah

dikurangi berbagai beban, termasuk biaya, penyusutan, dan pajak, serta menjadi indikator utama keberhasilan koperasi karena secara unik mencerminkan hasil aktivitas pelayanan kepada anggota (partisipatif) dan transaksi dengan non-anggota, yang kemudian akan dibagikan kembali kepada anggota sesuai kontribusi jasa dan modal mereka. Kinerja keuangan koperasi di Provinsi Bali dari aspek SHU mengalami fluktuasi, bahkan terdapat dua kabupaten yang mengalami penurunan rata-rata SHU dalam tiga tahun terakhir sesuai data pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perubahan Rata-rata SHU Koperasi di Provinsi Bali 2021-2023**

| Kabupaten/<br>Kota | Rata-rata SHU Koperasi |             |             | Persentase Perubahan<br>Rata-rata SHU |           |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|                    | 2021                   | 2022        | 2023        | 2021-2022                             | 2022-2023 |
| Karangasem         | 60.174.601             | 47.925.964  | 36.732.486  | -20,4                                 | -23,4     |
| Klungkung          | 96.831.440             | 84.407.575  | 79.949.064  | -12,8                                 | -5,3      |
| Gianyar            | 474.108.690            | 30.114.100  | 36.364.348  | -93,6                                 | 20,8      |
| Denpasar           | 224.668.486            | 69.530.620  | 153.876.115 | -69,1                                 | 121,3     |
| Badung             | 181.627.859            | 115.743.002 | 264.785.770 | -36,3                                 | 128,8     |
| Tabanan            | 61.372.411             | 43.843.100  | 45.184.194  | -28,6                                 | 3,1       |
| Buleleng           | 43.193.438             | 42.176.736  | 63.038.204  | -2,4                                  | 49,5      |
| Bangli             | 84.213.166             | 90.935.433  | 70.232.926  | 8,0                                   | -22,8     |
| Jembrana           | 35.107.789             | 41.528.552  | 44.644.292  | 18,3                                  | 7,5       |

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, (2021); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, (2022); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, (2023).

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua kabupaten yang mengalami penurunan rata-rata SHU selama tiga tahun terakhir yakni Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Penurunan terbesar terjadi pada Kabupaten Karangasem yakni menurun sebesar 20,4% dari tahun 2021 ke 2022 dan 23,4% dari tahun 2022 ke 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi di Kabupaten

Karangasem mengalami permasalahan paling besar terkait kinerja keuangan dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali.

Salah satu landasan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan adalah *Agency Theory*. Jensen dan Meckling (1976) menguraikan bahwasanya teori ini menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan (*agent*), di mana agen memperoleh kewenangan dalam menjalankan operasional serta mengambil keputusan atas nama pemilik. Pendelegasian wewenang tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan. Pemilik perusahaan berupaya memperoleh tingkat pengembalian investasi yang optimal, sedangkan manajemen cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi atau insentif yang lebih besar. Ketidakselarasan tujuan tersebut dapat memunculkan biaya yang dikenal sebagai *agency cost* (Putri & Endiana, 2020). *Agency cost* ini meliputi biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal (seperti audit eksternal dan perancangan sistem kompensasi) dan biaya penjaminan (*bonding cost*) yang dikeluarkan agen (seperti janji kontrak untuk tidak melakukan tindakan tertentu). Konflik kepentingan ini memicu manajer untuk mengambil keputusan yang tidak optimal bagi pemegang saham, seperti menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi (*perquisite consumption*), yang semuanya terwujud sebagai *agency cost* yang tidak produktif dan dibebankan pada laporan laba rugi, sehingga secara akumulatif menurunkan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan *Agency Theory*, kinerja keuangan dipengaruhi oleh terdapatnya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal

(pemilik) dan agen (manajer), sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif.

*Agency Theory* relevan sebagai *grand theory* karena dalam koperasi, terjadi hubungan keagenan di mana pengurus/manajemen (agen) mengelola aset atas nama anggota (prinsipal). Kehadiran *good corporate governance* (GCG), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah mekanisme kunci yang berfungsi untuk meminimalkan *agency problem*, yaitu konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan yang timbul dari asimetri informasi, sehingga memastikan pengurus bertanggung jawab dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan koperasi. *Good corporate governance* (GCG) menjadi alat pengawasan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perilaku manajerial yang sesuai dengan kepentingan pemilik. SIA memainkan peranan krusial didalam memberikan sejumlah informasi keuangan yang relevan dan akurat guna mengurangi ketidakseimbangan informasi. Kemudian di sisi lain, sistem pengendalian internal (SPI) memastikan bahwa kegiatan operasional dan pelaporan berjalan sesuai prosedur, mencegah kecurangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ketiga aspek ini saling mendukung dalam menekan risiko agensi dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel diatas terhadap kinerja keuangan. Penelitian Hongutomo & Dewi (2024) menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, studi Dewi et al. (2024) menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan, dan studi Samila & Fitra (2025)

menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan.

*Good corporate governance* mengacu pada landasan hukum dan etika yang mendukung proses dan sistem manajemen perusahaan, dimana implementasi *good corporate governance* yang baik pada dasarnya memperkuat kinerja keuangan (Hongutomo & Dewi, 2024). Penerapan *good corporate governance* dipandang sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjalankan etika bisnis dan etika kerja. Selain itu, pelaksanaan tata kelola yang baik diyakini dapat mengoptimalkan nilai perusahaan (Wideka et al., 2023). Terdapat 5 (lima) prinsip yang secara umum wajib diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menciptakan GCG antara lain independensi (*independency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran atau kesetaraan (*fairness*) (Hendra & Fahlevi, 2024). GCG mampu memengaruhi kinerja keuangan secara positif karena GCG menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan *good corporate governance* yang baik mendukung pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, pengawasan terhadap manajemen lebih ketat, serta risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan dapat dikurangi. Kondisi ini mendorong efisiensi operasional, meningkatkan penanam modal dan pemangku kepentingan, serta berdampak langsung pada peningkatan keuntungan dan stabilitas keuangan perusahaan.

Koperasi di Kabupaten Karangasem mengalami permasalahan *good corporate governance*. Sebanyak 107 dari 341 koperasi di Kabupaten Karangasem dinyatakan mati karena sudah tak aktif lagi atau sebagian mati suri. Faktor paling

banyak yang memperngaruhi koperasi tersebut tidak aktif karena tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Radarbali Jawapos, 2024). RAT berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pada *good corporate governance*, karena RAT berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban mutlak pengurus dan pengawas kepada seluruh anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Dalam RAT, pengurus wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai kinerja keuangan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta realisasi rencana kerja tahun sebelumnya, yang kemudian harus dievaluasi dan disetujui oleh anggota. Jika laporan tersebut disetujui, ini menunjukkan bahwa kewajiban fidusia pengurus untuk mengelola aset anggota secara profesional dan bertanggung jawab telah terpenuhi, sementara jika anggota menolak laporan tersebut, ini menjadi penekanan kontrol dan akuntabilitas langsung yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain, sehingga RAT adalah kunci untuk menjaga kepercayaan anggota dan keberlangsungan koperasi.

Hasil studi sebelumnya terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan masih belum konsisten. studi Wideka et al. (2023), Hongutomo & Dewi (2024), dan Pradnyawati & Hutnaleontina (2024) memperlihatkan bahwasanya GCG mampu memengaruhi kinerja keuangan secara positif, sementara studi Laksono (2020) memperlihatkan jika GCG tidak mampu memengaruhi kinerja keuangan.

Kinerja keuangan turut dipengaruhi oleh efektivitas sistem informasi akuntansi. nformasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dihasilkan melalui sistem yang mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi untuk mengolah data secara efektif (Putri & Endiana, 2020). Sistem

informasi akuntansi berfungsi membantu proses pengumpulan dan penyimpanan data transaksi yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai sarana yang mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi yang akurat dan relevan sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan bisnis secara efektif (Hongutomo & Dewi, 2024). System informasi akuntansi mampu memengaruhi kinerja keuangan secara positif, dimana system yang efektif akan dapat memberi informasi keuangan yang sesuai dan akurat guna memperkuat pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang andal mendukung perusahaan dapat mengelola aset, pendapatan, dan biaya secara efisien, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas, sehingga mendorong perbaikan kinerja keuangan secara keseluruhan. Koperasi di Kabupaten Karangasem juga mengalami permasalahan pada penggunaan sistem informasi akuntansi. Hasil observasi memperlihatkan bahwasanya masih banyak koperasi di Kabupaten Karangasem yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi sederhana dan belum terlindungi dengan baik. Banyak koperasi yang menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dari Microsoft Excel. Meskipun Microsoft Excel merupakan alat yang fleksibel, penggunaannya sebagai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) koperasi memiliki kekurangan signifikan terkait keamanan dan keakuratan data. Dari segi keamanan, file Excel rentan terhadap akses tidak sah dan manipulasi karena fitur perlindungan *password* yang relatif lemah dan tidak adanya sistem otorisasi berbasis peran, sehingga siapa pun yang memiliki akses ke file dapat mengubah atau menghapus data sensitif tanpa jejak audit yang memadai. Sementara itu, dari aspek keakuratan, sistem ini sangat

bergantung pada integritas operator. Kesalahan manusiawi dalam pengetikan rumus, penghapusan baris atau kolom secara tidak sengaja, dan kegagalan dalam penerapan prinsip *double entry* dapat terjadi dengan mudah, yang sulit dideteksi dan diperbaiki, mengakibatkan data akuntansi menjadi tidak andal dan berpotensi menghasilkan laporan keuangan (termasuk SHU) yang tidak akurat.

Hasil studi sebelumnya terkait pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan masih belum konsisten. studi Sumartini (2021), Yuscintara & Hendrani (2022), Hongutomo & Dewi (2024), dan Dewi et al. (2024) memperlihatkan bahwasanya sistem informasi akuntansi mampu memengaruhi kinerja keuangan secara positif, sementara studi Putri & Endiana (2020) dan Maulana (2022) memperlihatkan bahwasanya sistem informasi akuntansi tidak mampu memengaruhi kinerja keuangan.

Di samping penerapan *good corporate governance* dan sistem informasi akuntansi, kinerja keuangan turut ditentukan oleh efektivitas sistem pengendalian internal. Menurut Samila dan Fitra (2025), sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang melibatkan unsur manusia dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengarahkan, mengawasi, serta memastikan sumber daya organisasi digunakan secara tepat dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. Sebaliknya, penerapan sistem pengendalian internal yang belum optimal pada sejumlah koperasi dapat membuka peluang terjadinya tindakan kecurangan oleh karyawan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan mengganggu keberlangsungan operasional organisasi (Dewi et al., 2024). Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena sistem pengendalian internal membantu memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan efisien, aset

terlindungi, dan laporan keuangan disusun secara andal. Sistem pengendalian internal yang baik menyebabkan risiko kecurangan, kesalahan, dan penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berbasis data yang akurat. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan penanam modal dan efisiensi penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya memperkuat kinerja keuangan perusahaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum semua koperasi di Kabupaten Karangasem menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik seperti transaksi keuangan belum terdokumentasi dengan baik dan prosedur pengawasan kurang jelas.

Hasil studi sebelumnya terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan masih belum konsisten. studi Putri & Endiana (2020), Wideka et al. (2023), Dewi et al. (2024), dan Samila & Fitra (2025) memperlihatkan bahwa system pengendalian internal mampu memengaruhi kinerja keuangan secara positif, sementara studi Pradana et al. (2022) menyebutkan bahwasanya system pengendalian internal tidak mampu memengaruhi kinerja keuangan.

Perbedaan hasil yang ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa keterkaitan antara GCG, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja keuangan masih memerlukan kajian lebih mendalam. Atas dasar tersebut, studi ini dilaksanakan guna mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan. Studi ini dikembangkan dengan mengacu pada karya Wideka et al. (2023) yang membahas pengaruh GCG dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan. Peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni sistem informasi akuntansi untuk menciptakan kabaruan (*novelty*). *Novelty* (kebaruan) penelitian ini

juga terletak pada pengujian pengaruh parsial dan terfokus dari tiga mekanisme kontrol internal yakni GCG, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara terpisah terhadap kinerja keuangan koperasi. Studi ini memberikan kontribusi unik dengan memisahkan dampak masing-masing pilar kontrol dalam konteks koperasi, sebuah entitas yang memiliki keunikan tujuan sosial dan ekonomi. Studi ini mampu memberikan bukti empiris yang lebih jelas dan terperinci mengenai variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi, sekaligus mengisi celah literatur yang mayoritas cenderung menguji GCG, SIA, atau SPI terhadap kualitas laporan, bukan secara langsung terhadap kinerja keuangan koperasi.

Berlandaskan latar belakang diatas, dilaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Karangasem”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan diatas, maka bisa diidentifikasi permasalahan penelitian seperti dibawah ini:

1. Terdapat dua kabupaten yang mengalami penurunan rata-rata SHU selama tiga tahun terakhir yakni Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Penurunan terbesar terjadi pada Kabupaten Karangasem yakni menurun sebesar 20,4% dari tahun 2021 ke 2022 dan 23,4% dari tahun 2022 ke 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi di Kabupaten Karangasem mengalami permasalahan kinerja keuangan.

2. Koperasi di Kabupaten Karangasem mengalami permasalahan *good corporate governance*. Sebanyak 107 dari 341 koperasi di Kabupaten Karangasem dinyatakan mati karena sudah tak aktif lagi atau sebagian mati suri. Faktor paling banyak yang mempengaruhi koperasi tersebut tidak aktif karena tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT berkaitan dengan akuntabilitas pada *good corporate governance*. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak koperasi di Kabupaten Karangasem yang menggunakan sistem informasi akuntansi yang masih sederhana dan belum terlindungi dengan baik. Belum semua koperasi di Kabupaten Karangasem menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik seperti transaksi keuangan belum terdokumentasi dengan baik dan prosedur pengawasan kurang jelas.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian agar tetap relevan dengan tujuan yang sudah dirumuskan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek tertentu. Adapun batasan yang dipergunakan didalam studi ini antara lain:

1. Subjek penelitian difokuskan pada koperasi di Kabupaten Karangasem.
2. Objek penelitian difokuskan pada *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja keuangan.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan batasan permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan dalam studi ini, yakni:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari studi ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberi sejumlah kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam bidang akademik maupun praktik.

#### 1. Manfaat Teoritis.

- a) Temuan yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan serta menjadi salah satu acuan bagi pengembangan kajian sejenis pada masa yang akan datang.

- b) Selain itu, hasil studi ini diharap mampu menambah khazanah literatur di lingkungan akademik, khususnya yang membahas keterkaitan GCG, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal dengan kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Karangasem, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis.

### a) Koperasi di Kabupaten Karangasem

Hasil studi ini diharap bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi di Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kinerja keuangan.

### b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem

Hasil studi ini diharap mampu menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Karangasem dalam menetapkan kebijakan guna mengoptimalkan kinerja koperasi.

### c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi studi berikutnya serta menjadi bahan pertimbangan ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.